

**PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP  
KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI RIAU**

**Yolanda Rasyid<sup>1</sup>, Rama Gita Suci<sup>2</sup>, Annie Mustika Putri<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Riau<sup>1,2,3</sup>

yolandarasyid9@gmail.com<sup>1</sup>, ramagita@umri.ac.id<sup>2</sup>,  
annemustika@umri.ac.id<sup>3</sup>

***Abstract***

*This study aims to examine the effect of the audit opinion and BPK audit finding on the performance of local government in district/cities in Riau Province. The population in this study consisted of 12 districts/cities in Riau province with an observation period of 2016-2020. The sampling method in this study uses a non-probability sampling technique, namely a sampling method that does not provide equal opportunities or opportunities for each member of the population to be selected as a sample. The non-probability sampling method used is saturated sampling and the number of samples in the study is 60 samples. The test was carried out using the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach with the help of WarpPLS version 7.0 software used in data analysis and hypothesis testing. The results of the study found that audit opinions and audit findings have a negative effect on local government performance. This research has implications for local governments to have policies in regional financial management that are in accordance with statutory regulations so that they can make their local government performance better.*

**Keywords :** *Audit Opinion, BPK Audit Finding, and Local Government Performance.*

**PENDAHULUAN**

Pemerintah di Indonesia telah memberlakukan kebijakan pemerintah daerahnya sendiri sejak tahun 1999 dan telah diubah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (NKRI). Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota di provinsi Riau diharapkan dapat memahami kondisi dan permasalahan daerahnya secara menyeluruh. dimana pemerintah daerah harus mengelola keuangan

daerahnya yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga pembangunan dan pelayanan akan berjalan dengan baik dan merata.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di provinsi Riau. Salah satunya pemerintah daerah kota Pekanbaru dimana realisasi anggaran belanja daerah pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Dalam hal itu dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah tersebut (BPK Perwakilan Riau,2018). Kinerja pemerintah daerah merupakan hasil kegiatan pemerintah yang telah dilaksanakan dicapai. Sehingga penggunaannya telah terukur kualitas dan

kuantitasnya yang berakitan dengan anggaran. Tercapai atau tidaknya kemajuan suatu organisasi dapat dilakukan dengan mengukur kinerja.

Di Indonesia, ditemukan kasus mengenai opini audit pada semester I Tahun 2021, BPK memeriksa 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 pemda. Namun ditemukan satu pemda belum menyampaikan LKPD tahun 2020 (*unaudited*) kepada BPK untuk diperiksa. Namun, opini BPK terhadap LKPD provinsi Riau selalu mendapatkan Opini WTP setiap tahunnya. Namun, Fitra Riau mengatakan opini tersebut bertolak belakang dengan hasil pemeriksaa karena ditemukan cukup banyak permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang dapat berakibat kerugian negara, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, dan juga ditemukan adanya penyimpangan administrasi yang tidak menimbulkan dampak finansial (GoRiau, 2022).

Opini merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran atas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dan didasarkan pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*). Opini audit juga merupakan kesimpulan dari tinjauan atas informasi LKPD yang lengkap atau telah selesai diperiksa (Andre dan Maslichah, 2022). Dapat disimpulkan wajar jika informasi yang disampaikan secara jujur dan tanpa pertanyaan, serta diungkapkan sepenuhnya. Hasil penelitian yang dilakukan Kirana dan Sulardi, 2020 opini audit berdampak pada kinerja

keuangan pemerintah daerah sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Ditasari dan Sudrajat, 2020 opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, total dalam APBD Riau 2020 yang menjadi temuan BPK mencapai Rp.91 miliar lebih. Angka ini bahkan mengalami peningkatan dari 2019 lalu yang hanya Rp.27 miliar lebih. Hal ini berdasarkan data dari LHP BPK, jika ditotalkan dalam temuan audit LHP BPK khusus di provinsi saja tahun 2020 berjumlah Rp.91,204 miliar dimana terdiri dari temuan yaitu berpotensi kerugian sebesar Rp.81,6 miliar, kekurangan penerimaan sebesar Rp.1,9 miliar dan penyimpangan administrasi sebesar Rp.7,6 miliar. Temuan tersebut jika dilihat dari tahun sebelumnya di tahun 2019 yang mana kepala OPD juga masih yang sama dengan kepemimpinan saat ini. Jika ditrendkan sepanjang tahun 2019-2020 potensi temuan yang paling besar adalah di tahun 2020 sebesar Rp.91,204 miliar sedangkan tahun 2019 hanya Rp.27,504 miliar. Menanggapi hal ini Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra), ketidakpatuhan pimpinan OPD atau eselon II dalam mengelola anggaran belanja bisa disimpulkan sangat buruk atas kinerja dua tahun ini (RRI Pekanbaru, 2022).

Temuan audit merupakan suatu masalah yang muncul selama proses audit dan layak untuk diangkat dan dikomunikasikan kepada auditee karena dampaknya terhadap peningkatan dan peningkatan kinerja terkait pengelolaan keuangan.

Temuan audit BPK RI atas pelaporan keuangan pemerintah daerah menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengendalian intern dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah (BPK RI, 2018). Menurut penelitian Ditasari (2020), temuan audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil yang sama pada penelitian Wana *et al.*, (2021) yang mengatakan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian Verawaty dan Yeni (2021) mengatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Riau”

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori utama yang mendasari penelitian ini dapat dijelaskan melalui perpektif teori keagenan. Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976), yaitu adanya hubungan kerja antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*) untuk melakukan sebuah jasa atas kepentingan pemilik dimana dalam pelaksanaan jasa tersebut terdapat pelimpahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemilik kepada agen. Sehingga agen dapat memberikan laporan pertanggungjawaban kepada prinsipal sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang telah diberikan. Menurut penelitian Andre dan Maslichah (2020) menjelaskan bahwa teori

keagenan (*agency theory*) ini merupakan teori yang menganalisis adanya hubungan secara kontraktual antara dua atau bahkan bisa lebih organisasi, individu ataupun kelompok, yang menjelaskan hubungan *agen* dan *prinsipal* yang menekankan pada penyelesaian suatu masalah. Dengan harapan pihak lain (*agent*) melakukan atau melaksanakan pekerjaan dengan baik seperti yang diinginkan oleh salah satu pihak (*prinsipal*). Penerapan teori keagenan juga dapat dilakukan pada *sector public*. Terjadinya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh *agent* dalam suatu organisasi cenderung akan menimbulkan konflik keagenan.

### **Teori Institusional**

Teori institusional (*institutional theory*) menurut DiMaggio dan Powell (1983) menyebutkan bahwa perusahaan dalam lingkungan tertentu cenderung terstruktur dan serupa dengan perusahaan yang telah mapan artinya, sebagian besar perusahaan yang berada dalam lingkungan yang sama, cenderung memiliki karakteristik yang serupa.

DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi tiga mekanisme untuk perubahan institutional isomorphism. Pertama *coersive isomorphism*, merupakan hasil dari tekanan formal maupun informal yang diberikan pada organisasi dengan organisasi lainnya dimana mereka saling bergantung dan didalamnya yang terdapat fungsi organisasi. Kedua *mimetic isomorphism* atau meniru, terjadi ketika teknologi organisasi kurang dipahami. Ketika tujuan yang ambigu atau ketika terdapat ketidakpastian lingkungan, maka organisasi akan cenderung

menjadikan diri mereka sebagai model yang sama seperti organisasi lain dan mendorong organisasi untuk melakukan imitasi. Ketiga *normative isomorphism* yang berkaitan dengan profesionalisme.

Teori institusional telah muncul dan menjadi terkenal sebagai penjelas yang menguatkan, baik itu tindakan individu maupun organisasi. Teori institusional ini juga mendefinisikan bahwa suatu organisasi yang mengdepankan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal maupun harapan sosial dimana organisasi tersebut berada (Fitrianto dan Adi, 2016).

#### **Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut Wana *et al.*, (2021) menyatakan kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral maupun etika. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah merupakan ukuran hasil kerja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi dengan menggunakan kriteria yang telah disetujui oleh bersama. Kinerja pemerintah juga dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan daerah.

#### **Opini Audit**

Opini audit merupakan suatu pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini audit dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Dimana opini ini dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah (Masdiantini dan Erawati, 2016).

Menurut (Kusuma dan Kurnasih, 2017) opini audit merupakan pernyataan yang berupa kesimpulan pemeriksaan terhadap tingkat kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh auditor yang disajikan. Opini juga merupakan pendapat yang diberikan pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas (IHPS 1 BPK, 2018). BPK dapat memberikan empat jenis opini yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Wajar Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Opini merupakan pertanyaan profesional oleh pihak berwenang sebagai kesimpulan pemeriksa tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Menurut UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan, opini dapat menjadi tolak ukur dalam menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah dan dapat menurunkan ataupun menaikkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah (Ditasari, 2020). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa opini audit merupakan wujud akuntabilitas pemerintah daerah yang dapat dinilai oleh publik yaitu semakin baik opini audit maka semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut. Hal ini didukung

dengan hasil penelitian Suryaningsih (2016), Andani dan Respati (2019) yang menyimpulkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

**H<sub>1</sub> : Diduga Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**  
**Temuan Audit**

Temuan audit BPK merupakan jenis tindak kecurangan yang ditemukan pada laporan keuangan pemerintah pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK yang melanggar ketentuan pengendalian internal dan ketentuan perundang-undangan. Ketidapatuhan terhadap perundang-undangan menyebabkan kerugaian terhadap pemerintah daerah karena ketidakefisienan yang ditimbulkan (Tama dan Adi, 2018).

Berdasarkan teori institusional, BPK merupakan lembaga pemeriksa keuangan organisasi pemerintah yang memerlukan informasi dalam melakukan tugasnya yaitu sebagai pengawas untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara dalam teori keagenan, terdapat BPK sebagai principal yang menilai akuntabilitas pemerintah daerah melalui temuan audit laporan keuangan dan pemerintah daerah sebagai agent sehingga meminimalisir adanya antara pemerintah daerah dan BPK. BPK merupakan lembaga pemeriksa keuangan organisasi pemerintah yang memerlukan informasi dalam melakukan tugasnya yaitu sebagai pengawas untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan audit dapat menjadi suatu upaya dalam masalah yang mungkin terjadi dimana dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Temuan audit akan didukung

oleh bukti yang kuat dan memadai. Sehingga dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan dan penyiapan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan audit. Semakin baik temuan audit yang ditemukan maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Ditasari (2020),

Wana *et al.*, (2021) membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dimana semakin banyak jumlah temuan audit maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah itu dinilai.

**H<sub>2</sub> : Temuan Audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diperoleh dari website BPK Perwakilan Provinsi Riau.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah 12 kabupaten/kota di provinsi riau. Pengambilan sampel yang digunakan

ialah metode *nonprobability sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh (Sugiyono, 2019). Metode *nonprobability sampling* yang digunakan yaitu *sampling jenuh*. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila dalam pengambilan sampel dengan jumlah populasi yang relative kecil (Sugiyono, 2019). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 kabupaten/kota di provinsi riau yang memiliki data lengkap dan diperlukan peneliti dalam waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2016-2020.

#### **Definisi Operasional Variabel Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dikarenakan adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah sebagai variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel independen. Menurut Taufik dan Yesi (2020) indikator variabel kinerja pemerintah daerah menggunakan rumus :

$$\text{Kinerja Pemerintah Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}$$

#### **Variabel Independen Opini Audit**

Variabel opini audit ini menggunakan skala ordinal dimana opini audit diukur berdasarkan hasil opini BPK dengan cara memberi nilai 1 untuk opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), nilai 2

untuk opini Tidak Wajar (TW), nilai 3 untuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), nilai 4 untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), dan nilai 5 untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Ditasari dan Sudrajat, 2020).

#### **Temuan Audit**

Pada penelitian Ditasari dan Sudrajat (2020) temuan audit BPK diukur dengan temuan audit (dalam rupiah) dibandingkan dengan total anggaran belanja. Dengan demikian variabel temuan audit BPK dapat diukur menggunakan rumus :

$$\text{Temuan} = \frac{\text{Temuan Audit (dalam rupiah)}}{\text{Total anggaran belanja}}$$

#### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan menghitung data agar dapat disajikan secara sistematis dan dapat dilakukan interpretasi. Analisis data juga dapat dilakukan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square-Structural Equation Modelling* (PLS-SEM) untuk menganalisis data dan menguji hipotesis penelitian. Adapun alat analisis yang digunakan adalah software WarpPLS versi 7.0.

#### **Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019). Data dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimal dan jumlah data penelitian.

### ***Outer Model (Model Pengukuran) Combined Loadings and Cross Loadings***

Nilai yang dalam tanda kurung harus lebih besar daripada nilai *cross loading* atau *loading* pada konstruksi lainnya (Sholihin dan Ratmono, 2013). Terdapat dua kriteria untuk menilai apakah *outer model* memenuhi syarat validitas diskriminan yaitu (1) *loading* harus diatas 0,70 ; (2) nilai P signifikan < 0,05.

### ***Square Root AVE***

Nilai yang dalam tanda kurung harus lebih besar daripada nilai konstruk lainnya dalam satu kolom diagonal baik diatas maupun dibawah (Sholihin dan Ratmono, 2013).

### ***Inner Model (Model Struktural)***

#### ***R-Squared***

Koefisien determinasi menggunakan *R-Squared* menunjukkan berapa persentase variansi konstruk endogen/kriterion dapat dijelaskan oleh konstruk yang dihipotesiskan memengaruhinya (eksogen/prediktor), (Sholihin dan Ratmono, 2013). Apabila nilai  $R^2$  yang diperoleh dari hasil pengolahan semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar atau model yang digunakan semakin besar untuk menerangkan variabel dependennya.

### ***Output General Results***

Bagian *model fit indices and P values* menampilkan tiga indikator fit yaitu *average path coefficient* (APC), *average R-Squared* (ARS), dan *average infliction factor* (AVIF).

Nilai P untuk APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05 atau berarti signifikan. AVIF sebagai indikator multikolinearitas harus lebih kecil dari 5 (Sholihin dan Ratmono, 2013).

### **Uji Hipotesis**

Pada uji hipotesis menjelaskan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil korelasi antar konstruk diukur dengan *Path Coefficient* dan tingkat signifikan yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian yang telah ditetapkan. Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian yaitu sebesar 5%, sehingga signifikan atau tingkat kepercayaan 0,05 sebagai landasan untuk menolak atau menerima suatu hipotesis. Berikut dasar pengambilan keputusan :

- a. Apabila *P-value* <0,05 maka hipotesis diterima, jadi variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel terikat
- b. Apabila *P-value* >0,05 maka hipotesis ditolak, jadi variabel bebas secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Statistik Deskriptif**

Uji statistik deskriptif dilakukan pada opini audit dan temuan audit bpk terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil uji statistik deskriptif dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi ( $\delta$ ) disajikan dalam Tabel 4.1. berikut ini :

**Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Opini Audit	60	3.00	5.00	4.9000	.43957
Temuan Audit	60	.00	4.96	.8398	.89868
Kinerja Pemerintah Daerah	60	.79	1.17	.9929	.07198
Valid N (listwise)	60				

Sumber : WarpPLS Program Output,2022

Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 0,79 dan nilai maximum sebesar 1,17. Nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan sebesar 0,9929 dengan standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata yaitu 0,07198. Sehingga sebaran data tidak memiliki kesenjangan yang besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam variabel kinerja pemerintah daerah adalah stabil.

Opini Audit (X1) memiliki nilai minimum sebesar 3,00 dan nilai maximum sebesar 5,00 Nilai rata rata (*mean*) 4,9000 dan standar deviasi 0,43957. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai *mean* mengandung arti bahwa data yang digunakan dalam variabel opini audit adalah stabil.

Temuan Audit (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maximum sebesar 4,96. Nilai rata-rata (*mean*) 0,8398 dan standar deviasi 0,89868. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai *mean* mengandung arti bahwa data yang digunakan dalam variabel

temuan audit kurang stabil (baik). Sebab Sebab standar deviasi meupakan pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang tidak normal dan menyebabkan bias.

**Outer Model (Model Pengukuran)  
Combined Loadings and Cross Loadings**

Validitas konvergen merupakan bagian *measurement* model yang dalam SEM-PLS disebut *outer model* sedangkan dalam *covariance based SEM* disebut *confirmatory factor analysis (CFA)*. Output ini menampilkan konstruk pada kolom dan indikator pada baris. *Combined loadings and cross loadings* dapat dilihat dari nilai tanda kurung yang lebih besar daripada nilai *cross loadings*. Hasil *cross loadings* dapat menjadi indikasi terpenuhinya krtieria validitas diksriminan yang ditunjukkan dalam output warpPLS 7.0 dapat dilihat dari tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Combined Loadings and Cross Loadings**

	Opini Audit	Temuan Audit	Kinerja Daerah	Pemerintah	P-value
Opini Audit	(1.000)	0.000	0.000		<0.001
Temuan Audit	0.000	(1.000)	0.000		<0.001
Kinerja Daerah	0.000	-0.000	(1.000)		<0.001
Pemerintah				(1.000)	<0.001

Sumber : Warp-PLS Program Output, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 hasil indikator kinerja pemerintah daerah mempunyai loading yang lebih besar yaitu 1.000. *Cross loadings* ke konstruk opini audit dan temuan audit BPK sebesar 0,000. Hasil *combined loadings and cross loadings* terpenuhinya kriteria validitas konvergen yaitu nilai loading diatas 0,70 dan nilai p signifikan < 0,005.

Pada hasil indikator opini audit mempunyai loading sebesar 1.000. *Cross loadings* ke konstruk kinerja pemerintah daerah dan temuan audit BPK sebesar 0,000. Hasil *combined loadings and cross loadings* terpenuhinya kriteria validitas diskriminan yaitu nilai loading diatas 0,70 dan nilai p signifikan < 0,005.

Pada hasil indikator temuan audit BPK mempunyai loading

sebesar 1.000. *Cross loadings* ke konstruk kinerja pemerintah daerah dan opini audit sebesar 0,000. Hasil *combined loadings and cross loadings* terpenuhinya kriteria validitas diskriminan yaitu nilai loading diatas 0,70 dan nilai p signifikan < 0,005.

**Inner Model R-Squared**

*R-Squared* digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen dan proporsi variasi dari variabel dependen yang diterangkan oleh variasi dari variabel independen lainnya. Semakin tinggi *R-squared* menunjukkan model yang baik. Hasil *R-squared* dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4. 3 R-Squared**

<b>Model Struktural</b>	<b>R-squared coefficients</b>	<b>Adjusted coefficients</b>	<b>R-squared</b>
Kinerja Pemerintah Daerah	0,169	0,140	

Sumber : WarpPLS Program Output,2022

Dari tabel 4.2 diatas dapat diperoleh nilai R Square kinerja pemerintah daerah sebesar 0,167 atau 16,9%. Artinya adalah sebesar 16,9% kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh opini audit dan temuan audit. Sedangkan sisanya 83,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Output General Result**

Uji kecocokan model digunakan untuk mengetahui apakah

suatu model memiliki kecocokan dengan data dengan terdapat 3 indeks pengujian yaitu *average path coefficient* (APC), *average R-squared* (ARS) dan *avarege varians factor*(AVIF). Nilai APC dan ARS diterima apabila p-value <0,05 dan nilai AVIF lebih kecil dari 5. Adapun hasil kecocokan pada model *output general result* ini dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

**Tabel 4. 4 Hasil Output General Result**

<b>Model Fit and Quality Indices</b>	<b>Indeks</b>	<b>P-value</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
Average path coefficient (APC)	0,309	P = 0,002	P ≤ 0,05	Diterima

Model Fit and Quality Indices	Indeks	P-value	Kriteria	Keterangan
Average R-squared (ARS)	0,169	P = 0,043	$P \leq 0,05$	Diterima
Average block VIF (AVIF)	1,017	Good if $\leq 5$		Diterima

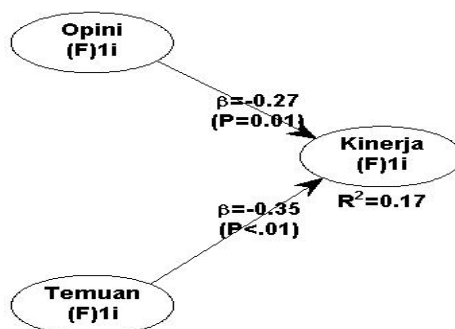
Sumber : WarpPLS Program *Output* 2022

Berdasarkan tabel 4.5, Diperoleh nilai *average path coefficient* (APC) sebesar 0,309 dengan *p-value* = 0,002 < 0,05 dan *average R-squared* (ARS) sebesar 0,169 dengan *p-value* = 0,043 < 0,05 yang berarti bahwa model peneliti mempunyai *fit* yang baik. Kemudian diperoleh nilai *average variance inflation factor* (AVIF) sebesar 1,017 < 5 yang berarti bahwa AVIF dapat diterima. Maka dari *output general result* pada penelitian ini memiliki kecocokan dengan data. dimana *Average Variance Inflation Factor* (AVIF) sebagai indikator

multikolinearitas harus lebih kecil dari 5.

### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksud untuk membuktikan kebenaran dugaan hipotesis. Hasil korelasi antar konstruk diukur dengan *path analysis result* dan tingkat signifikan yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian. Tingkat signifikan sebesar 5%. Berikut ini gambar *path analysis result* dan hasil dari *effect size* yang telah diperoleh berdasarkan pengolahan data :



Gambar 1 *Path analysis result* dan hasil dari *effect size*

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa variabel opini audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai *p-value* 0.01 dan nilai koefisien beta sebesar  $\beta$ .0.27. Temuan udit

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai *p-value* < 0.01 dan nilai koefisien beta sebesar  $\beta$  0.35. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Uji Hipotesis

	Path Coefficients	P values	Keputusan
Opini Audit	-0,272	0,012	Diterima
Temuan Audit	-0,345	0,002	Diterima

Sumber : WarpPLS Program *Output*,2022

### **Pembahasan Hasil Analisis Data Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Pada pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai *path coefficients* sebesar -0,272 dengan *p-value* = 0,012. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *p-value* = 0,012 < 0,05 yang berarti bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah audit. Kemudian diperoleh nilai *path coefficients* sebesar -0,272 yang artinya bahwa setiap peningkatan opini audit sebesar 1 tingkatan maka akan menurunkan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,272 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima, yang artinya opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Dapat disimpulkan bahwa hasil negatif pada tabel 4.6 untuk hipotesis ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2020 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau, namun di setiap tahunnya BPK selalu menemukan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak tertib, dengan permasalahan terkait : pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum tertib, penganggaran dan manajemen kas tidak mempertimbangan kemampuan keuangan daerah. Sehingga, BPK merekomendasikan pemerintah untuk segera meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerahnya dan juga BPK sebagai auditor pemerintah lebih menekankan pada kewajaran laporan keuangan yang berdasarkan

sistem pengendalian internal, catatan akuntansi, dan pemeriksaan akun-akun.

Berdasarkan teori agensi, pemerintah daerah harus bertanggungjawab dalam menyampaikan informasi mengenai hasil kerjanya kepada masyarakat secara transparan. Sehingga tidak terjadi *information asymmetry* atau ketidakseimbangan informasi yang diperoleh pada pihak principal maupun agent. Dimana opini audit ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi publik dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Hasil audit yang diberikan BPK merupakan cerminan ketepatan laporan keuangan yang dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Temuan ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu Karno dan Alliyah (2021) yang menemukan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa.

### **Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Pada pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai *path coefficients* sebesar -0,345 dengan *p-value* = 0,002. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *p-value* = 0,002 < 0,05 yang berarti bahwa temuan audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah audit. Kemudian diperoleh nilai *path coefficients* sebesar -0,345 yang artinya bahwa setiap peningkatan temuan audit sebesar 1 satuan maka akan menurunkan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,345 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima, yang artinya temuan

audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Temuan audit BPK ini merupakan permasalahan atau kasus yang ditemukan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan sistem pengendalian internal dan ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian daerah. Temuan ini akan menyebabkan BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPD. Sehingga, semakin besar atau tinggi jumlah temuan audit maka akan semakin rendah kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan teori institusional, pemerintah harus mengikuti aturan sesuai dengan salah satu pilar kelembagaan dari teori institusional yaitu pilar regulasi pemerintah harus berusaha mengikuti aturan yang agar tidak terjadi kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan sehingga menyebabkan temuan audit yang cukup besar.

Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Tama dan Adi (2018), Wana et al (2021) dan Ditasari dan Sudrajat (2020) yang mengatakan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dimana semakin banyak temuan audit BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan semakin rendah kinerja pemerintah daerah tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada

kabupaten/kota di provinsi Riau” , maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dikarenakan bahwa meningkat atau menurunnya opini audit yang diberikan oleh BPK belum tentu membuat kinerja pemerintah daerahnya baik melainkan menurun karena masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan juga BPK sebagai auditor pemerintah lebih menekankan pada kewajaran laporan keuangan yang berdasarkan sistem pengendalian internal, catatan akuntansi, dan pemeriksaan akun-akun.
2. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dikarenakan temuan audit dapat menjadi suatu upaya dalam masalah yang mungkin terjadi dimana dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Temuan audit akan didukung oleh bukti yang kuat dan memadai. Sehingga dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan dan penyiapan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan audit. Semakin baik temuan audit yang ditemukan maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

## **Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini masih mempunyai keterbatasan, diantaranya :

1. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu opini audit dan temuan audit dimana dapat dilihat nilai  $R$  Squarednya

sebesar 16,9%. Sehingga masih banyak variabel lain sebesar 83,1% yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

2. Periode penelitian hanya menggunakan lima tahun belum menggunakan tahun terbaru, sehingga hasil kesimpulan belum dapat digeneralisasikan untuk periode lainnya.

### Saran

Dalam melakukan penelitian, penulis menyadari adanya beberapa keterbatasan sehingga mendasari peneliti untuk memberikan saran berikut ini :

1. Penelitian berikutnya dapat menambah variabel independen lain yang mungkin mempengaruhi kinerja pemerintah daerah seperti karakteristik pemerintah daerah (ukuran daerah, belanja daerah, tingkat kekayaan daerah).
2. Mengganti periode penelitian dan lebih baik menggunakan tahun yang terbaru, sehingga dapat diketahui perubahan dan perkembangan terkait dengan kinerja pemerintah daerah.

### Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP seharusnya dapat memberikan kinerja yang baik karena opini audit dapat menjadi tolak ukur dalam menilai akuntabilitas terhadap entitas pemerintah daerah dan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pelaporan yang disajikan oleh pihak audit.

2. Hasil pemeriksaan BPK terkait adanya temuan audit menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerah dengan baik karena adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan peraturan dan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian daerah dan membuat kinerja pemerintah daerah tersebut menurun.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andre Bayu Pratama, Maslichah, dan M. C. M. (2022). *Pengaruh Opini Audit Bpk, Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017-2019*. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 09(02), 47–57.
- BPK RI. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I Tahun 2018. *Biro Humas Dan Kerja Sama Internasional BPK*, 1–470.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). (n.d.). *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational*.
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). *Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2),104.  
<https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7668>
- Fitrianto, F. F., & Adi, S. W. (2016). *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan Dankomitmen Manajemen*

- Terhadap Penerapan  
Transparansi Pelaporan  
Keuangan (Studi empiris pada  
Skpd Kabupaten Kebumen)  
(Doctoral dissertation,  
Universitas Muhammadiyah  
Surakarta).
- GoRiau (2022). Hasil Audit LKPD  
Pemda se-Riau 2018-2019.  
<https://www.goriau.com/berita/baca/hasil-audit-lkpd-pemda-seriau-2018-2019>
- Jensen, Michael C. dan Meckling,  
W. H. (1976). Theory of The  
Firm: Managerial Behavior,  
Agency cost and Ownership  
Structure. *Journal of Financial  
Economic.*, Vol. 3, 30.
- Karno, D. K. S., & Alliyah, S.  
(2021). *The Influence Of Local  
Government Characteristic and  
BPK Audit Opinion On The  
Financial Performance Of  
District/City Governments In  
Province Jawa tengah.* *Jurnal  
Inspirasi Ekonomi*, 3(1), 40–55.
- Kirana, A. S., & Sulardi. (2020).  
*Pengaruh Karakteristik  
Pemerintah Daerah dan Opini  
Audit Terhadap Kinerja  
Keuangan Pemerintah Daerah  
(Studi Empiris Pada  
Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota Di Indonesia  
Tahun 2018).* *Jurnal Akuntansi  
Dan Manajemen*, 8(2), 175–  
192.
- Kusuma, P. M., & Kurnasih, L.  
(2017). *Pengaruh Opini Audit  
Dan Karakteristik Pemerintah  
Daerah Terhadap Kinerja  
Pemerintah Kabupaten/Kota Di  
Indonesia.* *Equity*, 20(1), 51–66.  
<https://doi.org/10.34209/equ.v20i1.1487>
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N.  
made A. (2016). *Pengaruh  
Ukuran Pemerintah Daerah,  
Kemakmuran,  
Intergovernmental Revenue,  
Temuan Dan Opini Audit Bpk  
Pada Kinerja Keuangan.* *E-  
Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1150–  
1182.
- RRI Pekanbaru (2022).  
<https://m.rri.co.id>.
- Sholihin, S., Ratmono, D. (2013).  
*Analisis SEM-PLS dengan  
WarpPLS 3.0.* Yogyakarta : C.V  
Andi Offset
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian  
Kuantitatif dan Kualitatif R dan  
D.* Bandung : Penerbit  
Alfabeta.
- Tama, I. G. M. A. A., & Adi, P. H.  
(2018). *Pengaruh Karakteristik  
Kepala Daerah, Ukuran  
Pemerintah, dan Temuan Audit  
terhadap Kinerja Keuangan  
Daerah.* *Perspektif Akuntansi*,  
1(1), 91–113.
- Taufik Dasmal, Yesi Mutia Basri, N.  
I. (2020). *Pengaruh Kekayaan  
Daerah, Belanja Daerah,  
Intergovernmental Revenue,  
Temuan Audit Terhadap  
Kinerja Pemerintah Daerah.* 2,  
39–57.
- Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintah Daerah
- Verawaty, Yeni Widyanti, N. L.  
(2021). *Pengaruh Karakteristik  
Pemda Dan Temuan Audit Bpk  
Terhadap Kinerja Pemda  
Kabupaten Di Pulau Sumba.*  
*Journal of Auditing, Finance,  
and Forensic Accounting*, 4(1),  
1.<https://doi.org/10.21107/jaffa.v4i1.1878>
- Wana, D., Juniartika, S., Akuntansi,  
J., Pontianak, P. N., Akuntansi,  
J., & Tanjungpura, U. (n.d.).  
*Determinan kinerja pemerintah  
daerah provinsi di indonesia.*  
174–192